

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Studi ini menganalisa tentang efektivitas pengelolaan dana desa di desa Lape ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat. Untuk mengukur tingkat efektivitas tersebut peneliti menggunakan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program serta pemantauan program. Serta terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lape ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek pembangunan dan pembangunan masyarakat.. Oleh sebab itu, agar mencapai pembangunan desa yang memadai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak saja mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan di setiap program pembangunan, tetapi juga melibatkan masyarakat untuk mengenali masalah dan peluang atau potensi yang terdapat di masyarakat. Setiap proyek pembangunan akan gagal jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Demikian juga partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sangat penting agar dana desa tersebut dapat digunakan dan dikelola lebih efektif. Namun dalam hal partisipasi atau keterlibatan masyarakat, yang terjadi di Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa perihal pemanfaatan dan pengelolaan dana desa masih minim. Hal ini berdampak pada suport masyarakat terhadap berbagai program yang didanai desa. Tentunya

hal ini akan melanggar standar penanganan dan pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang bagaimana keuangan desa dikelola dan digunakan. Ada beberapa elemen yang mempengaruhi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa, yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program tersebut sehingga kurang berpartisipasi. Selain itu, karena warga Desa Lape kurang memiliki pengetahuan, sulit bagi mereka untuk memahami semua kegiatan yang dilakukan oleh orang lain di desa tersebut. (Tumbel, 2017)

Pemberian dana desa ke desa juga dapat dipandang sebagai salah satu wujud good governance, di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan keterlibatan masyarakat meningkat, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah lokal. Prinsip-prinsip good governance, menurut Haryanto (2007), meliputi partisipasi masyarakat, mendukung supremasi hukum, dan meningkatkan transparansi yang didasarkan pada arus informasi dan informasi yang bebas yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli dengan pemangku kepentingan, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan adanya strategi visi

Dikatakan juga bahwa yang terpenting dalam pemberian dana desa yaitu diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, namun juga harus melibatkan masyarakat secara etis sebagai tujuan utama kemakmuran desa. Masyarakat dipandang sebagai komponen yang paling penting dalam proses pembangunan, dan kami menyadari bahwa pembangunan harus dimulai dari bawah, dengan

masyarakat dimobilisasi untuk berperan aktif dalam mendorong pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi tumpuan pembangunan. Kemampuan untuk berubah dan kemauan untuk berubah adalah aset paling penting bagi orang untuk diberdayakan.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006), ada sejumlah alasan kenapa masyarakat perlu diajak dan didorong untuk berpartisipasi, antara lain (1) masyarakat benar-benar memahami kondisi dan keadaan lingkungan sosial dan ekonominya; (2) masyarakat dapat mengkaji sebab dan akibat dari beragam peristiwa yang timbul di masyarakat; dan (3) masyarakat bisa menyimpulkan solusi untuk mengatasi persoalan dan kendala yang dihadapinya. (4) Masyarakat bisa menggunakan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, dan teknologi) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas guna mencapai tujuan masyarakat; dan (5) masyarakat berupaya menumbuhkan kemampuan dan kemauan sumber daya manusianya, sehingga dapat menghilangkan ketergantungan dari pihak luar dengan mengandalkan rasa percaya diri dan kemandirian yang kuat. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya menyoroti dan menguak keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Asumsinya adalah bahwa partisipasi masyarakat selain sebagai upaya mempercepat pembangunan desa, namun juga dapat dilihat sebagai upaya terwujudnya demokratisasi desa.

Dalam penelitian ini, teori yang relevan adalah Good Governance, dan salah satu ahlinya, Hetifah Sj. Sumarto (2003), menyatakan “partisipasi merupakan salah satu karakteristik good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik”. Lebih lanjut UNDP mendefinisikan “partisipasi sebagai ciri pelaksanaan good

governance, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan apresiasinya”. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan berkontribusi secara konstruktif.

Permukiman Lape adalah sebuah desa di Kecamatan Lape, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa. Desa Lape dituding bermasalah dengan Dana Desanya pada tahun 2017. Salah satu warga Lape mengadukan dugaan penyimpangan penggunaan uang desa tahun anggaran 2015-2016. Menurut Abdul Kappi, tokoh masyarakat, terjadi inkonsistensi dalam alokasi dana desa pada 2015-2016 karena proses tidak sesuai prosedur dan hasil kegiatan pekerjaan fisik tidak memenuhi standar teknis. Abdul Kappi mencontohkan check dam di dusun Lape yang belum selesai dikerjakan sehingga kurang bermanfaat, mengakibatkan petani bersatu padu dan menggunakan bahan atau peralatan buatan sendiri seperti bambu dan terpal untuk mengairi sawahnya menggunakan check dam. Masalah kedua adalah jalan pedesaan, di mana hanya distribusi dan jintan selesai dalam tiga jam. Contoh ketiga adalah jalan beton rusak RW 08 yang baru selesai beberapa bulan sebelumnya. Selanjutnya adalah membangun jalan dengan talud yang lebih tinggi dari badan jalan sehingga menyebabkan banjir saat musim hujan. Disampaikan dari tingkat kecamatan ke tingkat DPRD, kemudian ke inspektorat dan kejaksaan dalam kasus ini. Meski inspektorat sudah setuju untuk melakukan investigasi lapangan, tidak ada tindak lanjut dari mereka. Alhasil, Abdul Kappi, bersama beberapa warga lainnya, berkontribusi ke kejaksaan untuk mendorong penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Lape segera di usut. (Samawarea, 2017)

Salah satu alternatif menanggapi pemerintah desa yang telah melakukan penyelewengan kekuasaan terhadap dana desa yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi yang efektif dan efisien yaitu partisipasi langsung warga negara, karena partisipasi masyarakat secara langsung merupakan hal yang paling berperan dalam keberhasilan dan menentukan kebijakan pengelolaan dana desa. Sedikitnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa akan mengurangi rasa kepemilikan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan yang efektif, mengontrol kegiatan yang adil dan hasil yang berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasniati dkk (2017) tentang *participation of coastal communities in the management of funds*, menyebutkan bahwa “partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan menjadi aktor pembangunan desa, berpartisipasi aktif dalam musrenbang, aspek control dalam pengawasan dan pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa. Masyarakat atau warga desa dapat berpartisipasi dalam bentuk tenaga, pikiran, fasilitas, kemampuan atau keahlian dalam bidang yang dikuasai masyarakat”. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah desa, akan tetapi juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki.

Masyarakat Desa Lape Kecamatan Lape diberi kesempatan untuk berperan aktif baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan hasil, serta evaluasi dari setiap tahap pembangunan yang dikerjakan oleh desa. Dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah dusun, pramusrenbang, serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes)

yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali.

Di sudut yang berbeda penggunaan dana desa terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Lape Kecamatan Lape, seperti yang dilakukan oleh mantan kepala desa pada tahun 2015-2016 dan dilaporkan tahun 2017 dalam masa jabatan mantan kepala desa tersebut sampai tahun 2020 yang tidak ada tindak lanjut dari kejaksaan dan pemerintahan lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lape Kecamatan Lape Tahun 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang di atas yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lape Kecamatan Lape ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lape Kecamatan Lape ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Manfaat Teoritis

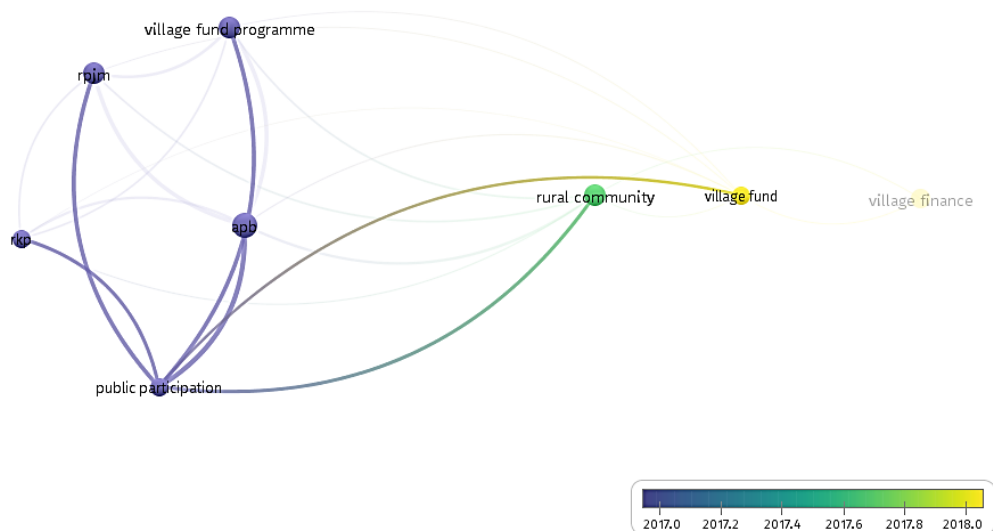
Secara teoritis, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi atau dasar riset perbandingan selanjutnya untuk dikembangkan dan

memberikan kontribusi atas perkembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut permasalahan dalam pengelolaan dana desa.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan acuan untuk mendorong kesadaran masyarakat guna memberikan kontribusi atas pengelolaan dana desa pada realitasnya.

1.5 Tinjauan Pustaka



Berikut tinjauan Pustaka yang diambil dari penelitian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, guna untuk membandingkan beberapa penelitian yang sebelumnya:

Menurut penelitian (Sendow et al., 2021) , ada tiga (3) langkah pengelolaan Alokasi Dana Desa: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Peneliti menawarkan saran untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa, karena hal ini akan menghasilkan pemerintahan desa yang lebih

transparan. Menurut penelitian (Nardianto et al., 2021), ada empat tahapan keberhasilan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang: adaptasi, efisiensi, pengembangan, dan kepuasan.

Penelitian (Sendow et al., 2021) menyimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari tiga (3) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Peneliti memberi masukan supaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan desa karena dengan melibatkan masyarakat akan menciptakan pemerintahan desa yang transparan. Penelitian (Nardianto et al., 2021) menunjukkan bahwa efektivitas alokasi dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, terdapat empat tahap yakni adaptasi, efisiensi, pengembangan dan kepuasan. Keempat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Menurut penelitian (Rini et al., 2021), keberhasilan pembangunan desa di Desa Manggar Raya, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dari tahun 2015 hingga 2018 belum optimal, yaitu 47,18 persen, 64,57 persen, 84,99 persen, dan 84,99 persen, masing-masing.

Menurut penelitian (Daraba, 2017), pelibatan masyarakat desa dimulai dengan penyusunan RPJM, RKP Desa, APB (Desa), pelaksanaan pembangunan desa, dan pemanfaatan hasil pembangunan desa. Program dana desa memberikan dampak yang baik dan cukup besar terhadap partisipasi masyarakat di desa. Menurut penelitian (Tumbel, 2017), aspek yang mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan inisiatif pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan

adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan uang desa juga sama. Menurut penelitian (Nurintan et al., 2020) Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa.

Menurut penelitian (Boedijono et al., 2019), desa-desa di Kabupaten Bondowoso secara umum telah mengelola keuangan desa dengan baik, namun dalam hal tertentu administrasinya masih belum tertib sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan uang desa untuk periode berikutnya. Menurut penelitian (Mingkid et al., 2017), tercapainya tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua telah tercapai, karena pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam meningkatkan pembangunan desa, dan pemerintah bersifat sosial dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan baik. Menurut penelitian (Amalia et al., 2019), pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung telah berhasil dengan baik, dengan kinerja keuangan pelaksanaan Dana Desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan dari tahun 2015 hingga 2018 mencapai pencapaian yang tinggi.

Menurut penelitian (Safuridar & Hanum, 2018), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah berhasil di Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat. Menurut penelitian (Dethan, 2019) efektivitas didefinisikan sebagai ukuran tingkat kesesuaian antara hasil aktual dan hasil yang diproyeksikan

sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Pendidikan, pendapatan masyarakat, dan kesehatan termasuk di antara inisiatif fisik dan non-fisik yang dialokasikan uang desa.

Menurut Penelitian (Dewi & Dewi, 2021) untuk melihat bagaimana kompetensi, tanggung jawab, dan peran fasilitator desa mempengaruhi administrasi dana desa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut penelitian (Mulyadi, 2019), efektivitas penyerapan dana desa yang diperoleh dari hasil penelitian ini mencapai 97,22 persen-100 persen. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian (Kambey, 2017), efektivitas ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik di desa Karegesan belum optimal karena kurang efisiennya penggunaan tenaga kerja, efektifitas dengan ketepatan perhitungan biaya yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan. anggaran dengan hasil pembangunan, dan efektifitas dengan ketepatan dalam pengukuran penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif karena pengukuran yang dilakukan berulang-ulang.

Penelitian (Dewi & Dewi, 2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian (Mulyadi, 2019) menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan desa dana yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pencapaian realisasi keuangan desa mencapai 97,22%-100%. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa

adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan desa, dan partisipasi komunitas. Penelitian (Kambey, 2017) menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan fisik di desa Karegesan belum optimal karena tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja, efektivitas dengan ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karena pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang.

Menurut penelitian (Laloma, 2021), perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Meko sudah maksimal namun tidak semua tokoh masyarakat berperan di dalamnya. Menurut penelitian (Priyanda & Ubaidullah, 2020), efektivitas yang dijelaskan oleh Martani dan Lubis, baik dari segi pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran, dalam implementasinya di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh dinilai berhasil. Menurut penelitian (Putri et al., 2021), kebijakan dana desa diterapkan agar lancar di desa Tajinan selama masa Covid-19. Dan efisiensi anggaran dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Tajinan selama pandemi COVID-19 sangat menguntungkan. Pelaksanaan APBD tahun 2019 hingga 2020 mengalami perubahan.

Menurut penelitian (Idrus et al., 2021), pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong tidak efektif. Beberapa unsur yang mempengaruhi efektivitas aturan pengelolaan pendapatan desa di Kecamatan Parigi Selatan antara lain faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Menurut penelitian (Fahri, 2017), kebijakan

Dana Desa dapat dilaksanakan dengan baik dengan menetapkan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa. Menurut penelitian (Saputra, 2016), efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009 hingga 2014 sudah efektif. Pengetahuan masyarakat tentang ADD, miskomunikasi, dan keterlambatan pencairan alokasi dana desa menjadi kendala dalam pencapaian alokasi dana desa di Desa Lembean.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Natasya Niken Sendow Dientje Rumimpunu, SH, MH Wilda Assa, SH, MH	Efektivitas alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan sesuai pp no. 22 tahun 2015 (studi kasus di desa tincep kecamatan sonder)	Ada empat langkah efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa: penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Karena kurangnya pemahaman tentang penyelenggaraan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya masih terbatas, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak merespon operasional pengelolaan Alokasi Dana Desa..
2.	Rio Nardianto, dkk	Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan	Adaptasi, efisiensi, pengembangan, dan kepuasan merupakan empat aspek yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

		Lemahabang Kabupaten Karawang	
3.	Kencana Dewi dkk	Analisis penggunaan dana desa terhadap efektivitas pembangunan desa dalam menerapkan permendes no. 19 tahun 2017	Hal tersebut sesuai dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, berdasarkan temuan penelitian dari tiga tahapan administrasi penggunaan Alokasi Dana Desa. Namun karena kurangnya pemahaman tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa masih terbatas sehingga mengakibatkan masyarakat tidak merespon kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Efisiensi pembangunan desa dihitung dengan membagi hasil aktual dengan anggaran dikalikan 100%.
4.	H. Dahyar Daraba	Pengaruh program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan galesong	Pelaksanaan Program Dana Desa menghasilkan dampak yang baik dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan desa berupa nasehat, barang, tenaga, dan partisipasi dalam memanfaatkan hasil

		utara kabupaten takalar	pembangunan masyarakat.
5.	Satria Mentari Tumbel	partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa tumaluntung satu kecamatan tareran kabupaten minahasa selatan	Menurut indikator dan tahapan Cohen and Uphoff, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumaluntung Satu adalah: 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan 4. Partisipasi dalam tahap evaluasi.
6.	Astri Nurintan, dkk (2020)	penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa	Penerapan prinsip transparansi, berupa terbukti terbentuknya Kim (Komunitas Informasi Manusia), pembuatan papan informasi, dan anggaran dana desa terbuka, sedangkan prinsip akuntabilitas telah dilaporkan kepada camat dan masyarakat yang biasanya disampaikan secara lisan oleh aparat Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar dalam hal partisipasi masyarakat dinilai sangat proaktif. Faktor pendukung internal dan eksternal yang

		pernek, kecamatan moyo hulu, kabupaten sumbawa besar	mempengaruhi penerapan konsep keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi berdasarkan UU 6 Tahun 2014 di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar terbagi menjadi dua kategori.
7.	Boedijono, dkk (2020)	Efektifitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bondowoso	Tahapan perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa menunjukkan proses perencanaan yang transparan dan inklusif. Sementara itu, masih ada beberapa hambatan dalam mengadopsi keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa digunakan pada tahap penatausahaan keuangan desa. Terdapat temuan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa bahwa beberapa desa mengalami keterlambatan pelaporan karena banyaknya permintaan dokumentasi dalam pelaporan. Sementara itu, tantangan pada tahap akuntabilitas adalah kurangnya dokumentasi pendukung serta banyaknya format pelaporan yang bervariasi secara berkala.
8.	Gary Jonathan Mingkid, dkk	Efektivitas penggunaan dana desa dalam	Pemerintah konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam meningkatkan pembangunan desa, dan pembangunan yang tepat

	(2017)	peningkatan pembangunan (suatu studi di desa watutumou dua kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara)	<p>sasaran mendapat respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui dana desa hingga di Desa Watutumou Dua , Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Desa Watutumou Dua memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam hal pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur.</p>
9.	Lubherty Dewi Amalia, dkk (2018)	Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa greges, kecamatan	<p>Pelaksanaan Dana Desa diprioritaskan untuk Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari tahun 2015 hingga 2018, efisiensi penerapan Dana Desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang bervariasi. Pemerintah desa menghadapi kendala atau kekurangan dalam melaksanakan Dana Desa untuk program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat, antara lain kurangnya atau rendahnya sumber daya manusia dari perangkat desa dan masyarakat desa, serta rendahnya</p>

		tembarak, kabupaten temanggung tahun 2015-2018	partisipasi masyarakat dalam program Dana Desa, mengakibatkan dalam pelaksanaan Dana Desa yang kurang optimal.
10.	Safuridar, (2018)	Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat	Peningkatan kapasitas kelurahan dalam hal kapasitas administrasi, kemampuan melayani masyarakat, pengaspalan jalan penghubung antar dusun, serta pembangunan dan perbaikan parit di kanan kiri jalan merupakan salah satu pengembangan yang dilakukan di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara pemberdayaan pemuda dan masyarakat miskin. Ada juga kemajuan dalam perbaikan gizi ibu hamil dan anak-anak.
11.	Minarni Anaci Dethan	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (add): suatu pendekatan	Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur efektivitas penggunaan dana desa, antara lain: (a) Pencapaian tujuan; (b) Penetapan waktu, proses pencairan, dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan

		teoritis	kegiatan yang direncanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan; (c) Dalam akreditasi penggunaan dana desa; (d) Dalam akreditasi penggunaan dana desa; (d) Dalam akreditasi penggunaan dana desa; (D)
12	Luh Putri Persika Dewi,dkk	Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa	Kesimpulan: Semakin baik atau optimal laporan pengelolaan dana desa apabila setiap perangkat desa memiliki kompetensi yang memadai, dan semakin tinggi akuntabilitas perangkat desa dalam pelaporan maka akan semakin baik pula hasil pengelolaan dana desa, dan semakin tinggi atau baik pula. peran asisten desa akan. uang masyarakat dikelola dengan cara yang lebih efisien.
13.	Irma Mulyadi	Efektivitas pengelolaan keuangan desa: studi pada pemerintahan desa di kota sawahlunto	Efektivitas penyerapan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2017 yang ditentukan oleh penelitian di seluruh desa di Kota Sawahlunto sangat baik. Temuan ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa menghabiskan seluruh Dana Desa yang dianggarkan pemerintah untuk operasional pembangunan fisik desa. Namun anggaran Dana Desa yang dilaksanakan tidak memenuhi semua tujuan masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa penggunaan Dana Desa dapat

			memberikan manfaat langsung bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta dilakukan secara adil.
14.	Edwien Kambey	Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa karegesan kecamatan kautidan kabupaten minahasa utara	<p>1. Dari segi efisiensi Karena penggunaan tenaga kerja yang kurang efektif, ketepatan waktu pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan tidak optimal.</p> <p>2. Efektifitas Perhitungan Biaya dan Ketepatannya Dalam melaksanakan program, tidak ada kesesuaian antara dana yang diproyeksikan dengan hasil pembangunan dari segi kualitas bangunan di desa Mantehage 1 Karegesan.</p> <p>3. Efektivitas pengukuran penggunaan uang desa secara akurat dapat dianggap efektif karena pengukuran dilakukan berkali kali.</p>
15.	Salma banna kadang (2021)	Efektivitas pengelolaan dana desa di desa meko kecamatan pamona barat kabupaten poso	Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa Meko berdasarkan temuan studi dapat dikatakan cukup baik, dengan tahapan perencanaan dimulai dari tingkat terendah desa. Sementara itu, karena tidak semua tokoh masyarakat terlibat secara aktif dalam perumusan rencana, maka proses perencanaan kurang dalam hal keterlibatan. Sementara itu, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa

			dalam hal pembagian kerja terbukti berhasil. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dinilai sudah efektif atau maksimal.
16.	Priyanda, Ubaidullah	Efektivitas penggunaan dana desa di gampong lueng bata kota banda aceh	Menerangkan bahwa kinerja atau kemampuan pemerintah desa sudah baik, dan masyarakat menyetujui bahwa uang gampong telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur Gampong. Program alokasi dana desa sedang dilaksanakan di Desa Lueng Bata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17.	Dewi Sabrina Aisyah Putri, M. Ridwan Basalamah,Eris Dianawati	Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di	Anggaran dana desa yang disisihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 terbukti bermanfaat. Masyarakat di Desa Tajinan dididik tentang pandemi Covid-19, dan desa tersebut juga membuat program baru yaitu “Kampung Tangguh” untuk memastikan bahwa masyarakat desa Tajinan tetap stabil dan terjaga meski di tengah wabah Covid-19. Keefektifan Desa Tajinan dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa pada anggaran dana desa sudah

		Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)	sangat baik, dan masuk dalam kelompok efektif.
18.	Idrus, Osgar S. Matompo, Ardin	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong	Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, antara lain: faktor hukum, faktor penegakan hukum, fasilitas hukum, faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan.
19.	Lutfhi Nur Fahri	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam	Penerapan kebijakan dana desa berdampak baik dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

		Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan	
20.	I Wayan Saputra	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli berada pada kategori efektif dengan tingkat efektivitas berkisar antara 90% sampai 100% setiap tahunnya (efektif). a) Pemahaman masyarakat tentang ADD, b) terjadinya miskomunikasi antar unit kerja baik di internal pemerintah desa, pemerintah dan masyarakat, serta pemerintah dan pemangku kepentingan, dan c) pencairan alokasi dana merupakan kendala yang dihadapi oleh ADD

Berdasarkan 20 kajian Pustaka diatas yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul Efektivitas pengelolaan dana desa di desa Lape Kecamatan Lape ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian sebelumnya Sebagian besar membahas efektivitas pengelolaan dana desa akan tetapi tidak difokuskan dengan partisipasi masyarakat di lokasi penelitian sebelumnya. Penelitian Sebagian besar menggunakan penelitian kualitatif dan terdapat juga penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian sebelumnya belum ada yang mengambil studi kasus di Desa Lape sehingga tidak ditemukan peneliti penelitian sebelumnya di internet di Desa tersebut. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori tentang Efektivitas

Efektif berasal dari Bahasa Inggris “effective” yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah mengartikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, menunjang tujuan atau hasil guna. Soewarno (1994:16) berpendapat bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Pendapat tersebut selaras dengan Hidayat dalam jurnal (H. Setiawan, 2014) yang mengatakan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Dalam jurnalnya (Mutiarin & Khadafi, 2017), Effendy berpendapat bahwa

efektivitas merupakan komunikasi dalam proses pencapaian tujuan sesuai dengan biaya yang sudah dianggarkan, waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya serta jumlah personil yang sudah ditentukan. Hedayaningrat (1996) didalam buku yang berjudul Azas – azas Organisasi Manajemen, ia berpendapat bahwa efektivitas merupakan pengukuran yang artinya tercapainya sasaran serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan juga menurut Mahmudi 37 (2005) menjelaskan “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Sejathi dalam jurnal (Maria Ulfa, 2018), efektivitas adalah “ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.” Di dalam jurnal tersebut Ali Muhidin juga menjelaskan bahwa: “Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client”.

Efektivitas sendiri berfokus terhadap hasil atau outcome, program, atau kegiatan yang dirasa efektif jika yang dihasilkan itu dapat memenuhi tujuan yang sudah ditentukan atau diharapkan. Efektivitas adalah suatu unsur pokok guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap kegiatan, program maupun organisasi. Disebut efektif jika apa yang telah ditentukan tercapai atau tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip

Soewarno Handayani S. (1994:16) dalam jurnalnya (Darinsyah, 2014).

Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), dalam jurnal yang sama juga mengatakan : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan 38 saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.

Selanjutnya Steers (1985:87) juga menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya yang berjudul Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya”.

Dalam Jurnalnya (Mutiarin & Khadafi, 2017) juga mengutip dari Cambel (1989:47) yang menyatakan bahwa “Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.”

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran akan menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas serta waktu) yang sudah dicapai oleh kelola atau manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya atau sudah dirancang terlebih dahulu. Maka bisa dikatakan juga bahwa efektivitas adalah ketepatgunaannya suatu program dalam untuk menuju atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Maka dalam penelitian ini menggunakan model atau indikator dari Budiani (2007:53) yang dikutip dalam jurnal (Mutiarin & Khadafi, 2017) mengatakan untuk mengukur efektivitas suatu program dapat menggunakan variabel sebagai berikut :

a. Ketepatan Sasaran Program

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan pelaksana program untuk mensosialisasikan program sehingga informasi pelaksanaannya dapat tersampaikan kepada masyarakat luas dan sasaran peserta program pada umumnya.

c. Tujuan Program

Artinya sejauh mana hasil pelaksanaan program sejalan dengan tujuan program yang direncanakan atau ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan Program

Artinya kegiatan pengawasan yang telah dilakukan setelah

selesainya program tersebut, sehingga ada bentuk rasa perhatian terhadap peserta program.

Seperti yang dijelaskan di atas, , indikator – indikator untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu program menggunakan variabel ketepatan sasaran program, yang berarti apakah program dari Dana Desa Lape tersebut sudah sesuai dengan indikator – indikator tersebut, Sosialisasi program artinya, melakukan sosialisasi terhadap program atau kebijakan yang ingin dikerjakan atau dilakukan, Tujuan program yang berarti apakah target program atau kebijakan tersebut sesuai dengan rencana dan atau sama dengan hasil pelaksanaan program atau kebijakan tersebut, dan yang terakhir adalah pemantauan program artinya kebijakan yang sudah selesai akan tetapi tetap dijaga oleh pembuat atau pihak yang bersangkutan tetap memperhatikan setelah selesainya kebijakan atau program tersebut telah terlaksana.

1.6.1.1 Faktor- Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa ditinjau dari sudut pandang partisipasi masyarakat

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a) **Faktor internal**, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- b) **Faktor eksternal**, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran

akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal, menurut Slamet (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan,

keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal, menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Saharudin (2005) bahwa Peran stakeholder akan mempengaruhi bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung.

Angell (dalam Lisdiana 2013:9) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: Yang pertama, usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. Kedua, jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. Ketiga pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Keempat, pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. Kelima, lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

1.6.2 Teori Tentang desa

1.6.2.1 Pengertian Desa

Desa merupakan entitas pemerintahan pada tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan penduduk dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintah mengakui keberadaan Desa dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berbasis masyarakat, prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihargai”.

Menurut Soenarjo (Nurcholis 2011; 4), “desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, mempunyai jiwa dan raga yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena keduanya mempunyai kedudukan politik, ekonomi, kepentingan sosial, dan keamanan, mempunyai pengurus yang dipilih bersama, mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak mengurus sendiri urusan rumah tangganya”.

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011; 4), “desa atau berdasarkan susunan aslinya adalah “Badan Hukum” dan “Badan Pemerintah” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau kelurahan. wilayah yang mengelilinginya adalah "Badan Hukum" dan "Badan Pemerintah".

Menurut definisi ini, desa didefinisikan sebagai “suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas tertentu dan ditempati oleh sekelompok orang yang

dikenal sebagai komunitas yang memiliki kesamaan identitas dan seperangkat adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bekerja sama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani atau nelayan. Desa ini dihuni oleh orang-orang yang saling mengenal melalui kepentingan keluarga, politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, membentuk kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat, memungkinkan terwujudnya hubungan lahir dan batin di antara anggota masyarakat”.

1.6.2.2 Jenis-Jenis Desa

Sugihen (2004: 25) membagi empat jenis desa. Keempat jenis desa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Desa Sederhana (pra desa)

Karena perilaku masyarakatnya yang sering berpindah-pindah, desa-desa dalam kategori ini disebut sebagai pemukiman sementara, mungkin hanya sebagai tempat persinggahan dalam sebuah perjalanan, karena tempat itu akan segera ditinggalkan lagi. Pola pemukiman ini memiliki ciri tersendiri. Hampir tidak ada orang atau keluarga yang tinggal atau tinggal di sana karena semua penghuni akan pergi setelah panen selesai atau ketika tanah, yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka, tidak lagi menghasilkan hasil yang cukup.

2. Desa Swadaya

Desa ini bersifat menetap, yang berarti bahwa kelompok (keluarga) tertentu tinggal di sana sepanjang tahun. Pada umumnya permukiman ini masih bersifat tradisional dalam arti mata pencaharian utama masyarakat masih bertani, yang meliputi mengumpulkan hasil hutan, beternak, dan beternak ikan di tambak-tambak

kecil. Teknologi pertanian masih dalam masa pertumbuhan, dan tenaga kerja hewan dan manusia merupakan sumber energi utama untuk pertanian. Hubungan individu dan/atau kelompok (masyarakat) sering kali dibangun di atas dan diatur oleh kebiasaan yang ketat. Tingkat pendidikan sebagai indikator tipologi desa belum berkembang dan desa tersebut jauh dari pusat perekonomian

3. Desa Swakarya

Adat-istiadat yang menjadi tatanan kehidupan sosial di dusun ini mulai mengalami pergeseran sebagai respon terhadap perubahan bagian kehidupan sosial budaya lainnya. Adat tidak lagi terlalu berat dalam mempengaruhi atau menentukan pola perilaku anggota masyarakat. Peluang kerja mulai bermunculan yang lebih beragam dibandingkan dengan yang ada di desa swadaya. Produksi pertanian sekarang mencoba untuk ditukar dengan barang-barang lain melalui sistem pasar, bukan hanya memasok kebutuhan sehari-hari. Produktivitas tenaga kerja meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi, dan infrastruktur yang memadai dan terpelihara dengan baik. Meskipun jarang orang menyelesaikan sekolah menengah, rata-rata orang memiliki ijazah sekolah menengah.

4. Desa Swasembada

Pola desa terbaik dari bentuk desa sebelumnya adalah desa mandiri. Infrastruktur desa baik, dan bentuk perumahan bervariasi dan sesuai dengan standar permukiman yang baik. Banyak orang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Mayoritas masyarakat tidak lagi mengandalkan hasil dari sektor usaha pertanian mereka sendiri untuk penghidupan mereka. Pengaruh eksternal terlihat pada perilaku masyarakat desa yang sudah mulai menggunakan teknologi maju,

meskipun belum merata. Masyarakat desa mandiri adalah masyarakat yang terbuka dengan masyarakat di luar desanya; Pengaruh eksternal terlihat pada perilaku masyarakat desa yang sudah mulai menggunakan teknologi maju, meskipun belum merata.

1.6.3 Teori tentang Dana Desa

1.6.3.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang secara tegas diperuntukkan bagi desa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui uang APBD Kota/Kabupaten, sesuai dengan buku saku Menteri Keuangan dana desa yang diterbitkan tahun 2017. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Sedangkan menurut Lili (2018), “dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun dari APBN, yang sengaja diberikan kepada desa dengan mentransfernya langsung melalui APBD Kabupaten/Kota, dan yang digunakan untuk mendanai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan desa, serta pemberdayaan seluruh masyarakat. Pedesaan”.

Dana desa menurut acuan di atas merupakan anggaran yang menjadi hak desa, dan merupakan tugas pemerintah pusat untuk menyalurkannya ke desa dengan memindahkannya langsung dari APBN ke APBD dan selanjutnya masuk

ke kas desa.

1.6.3.2 Sumber Dana Desa

Desa sebagai bagian dari perannya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pendapatan desa yaitu :

- a. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- b. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain.
- c. Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- d. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- e. Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- f. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri

yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- g. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

1.6.3.3 Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Menurut (dosenppkn.com, diakses pada 25 Januari 2020), dana desa memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sedangkan tujuan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di desa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, menghilangkan perbedaan bidang pembangunan antar desa, dan memperkuat warga desa sebagai subjek pembaharuan.

Alokasi anggaran di desa ditangani oleh pihak yang berwenang, yang bermanfaat untuk mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar dapat mengikuti perkembangan pesat masyarakat. Berikut ini adalah beberapa keuntungan memiliki anggaran desa:

1. Memperbaiki aspek ekonomi dan pembangunan dari situasi

Karena anggaran didistribusikan secara adil dan merata, pembentukan anggaran dana desa akan mempercepat distribusi atau akses di desa, mengatasi hambatan yang dapat memakan waktu untuk diselesaikan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur publik.

2. Meningkatkan SDM desa

Semakin besar anggaran dana desa tahunan pemerintah pusat, maka semakin tinggi pula kualitas SDM desa yang harus dimiliki dalam mengelola uang tersebut. Akibatnya, uang tidak hanya digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan di desa, tetapi juga untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. (dosenppkn.com, terakhir dikunjungi 25 Januari 2020).

Penjelasan tersebut di atas mengarah pada kesimpulan bahwa tujuan dan manfaat dana desa hanya untuk kesejahteraan masyarakat desa, baik dari segi pembangunan maupun ekonomi.

1.6.4 Teori tentang Partisipasi Masyarakat

1.6.4.1 Partisipasi

Partisipasi berasal dari etimologi dari kata bahasa Inggris "participation", yang berarti "mengambil bagian/ keikutsertaan". Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah "ikut serta dalam suatu kegiatan" dalam kamus bahasa Indonesia keseluruhan. Juliantara (2002:87) selanjutnya mengatakan bahwa partisipasi adalah berfungsinya sistem pemerintahan di mana tidak ada kebijakan yang dibuat tanpa persetujuan rakyat, dan proses pemberdayaan adalah arah utama yang harus ditempuh.

Untuk mendukung pandangan tersebut, Howell S. Baum (2015:1) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai "keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk lainnya, termasuk kegiatan yang

memungkinkan beberapa individu dan kelompok untuk mempengaruhi keputusan publik (serta pihak swasta) yang mencerminkan kepentingan mereka.”

Sumarto (2004: 17) mendefinisikan keterlibatan masyarakat sebagai “suatu proses di mana warga negara, sebagai individu, kelompok sosial, dan organisasi, mengambil peran aktif dan berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.”

1.6.4.2 Masyarakat

Dalam bahasa Inggris, “society” berasal dari kata latin “socius” yang berarti “hidup” (teman). Istilah "masyarakat" berasal dari kata Arab "syarakah", yang berarti "bertetangga" (berpartisipasi dan ikut serta). Dengan kata ilmiah, masyarakat adalah sekelompok orang yang bergaul satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain. Sebuah unit manusia dapat memiliki infrastruktur yang memungkinkan warganya untuk berkomunikasi satu sama lain. Menurut definisi lain, masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut seperangkat kebiasaan yang konsisten dan dipersatukan oleh rasa identitas bersama. 115-118 (Koentjaraningrat, 2009).

Masyarakat menurut Noor (2007:85), adalah sekelompok individu yang sudah mempunyai seperangkat aturan, konvensi, dan praktik yang semuanya diikuti secara merata di lingkungannya. Tatanan kehidupan, konvensi yang mereka ikuti, menjadi landasan bagi keberadaan sosial di lingkungan mereka, yang memungkinkan mereka membentuk kelompok manusia dengan ciri kehidupan tertentu.

Menurut Soekanto (2002:104), para antropolog sosial biasanya memandang

masyarakat sebagai wadah bagi individu-individu yang buta huruf, memperbanyak diri, memiliki adat istiadat, memelihara ketertiban melalui penggunaan sanksi sebagai bentuk kontrol sosial, dan memiliki tempat tinggal.

1.6.4.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan masyarakat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Menurut Conyer (1984), *community engagement* diartikan sebagai keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan.

Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah partisipasi seluruh anggota atau perwakilan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan, termasuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang ingin dicapai dan cara pelaksanaannya, serta hasil pelaksanaannya, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut.

Selanjutnya menurut Yadav (Theresia, 2014: 198), empat bentuk partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Setiap program pengembangan masyarakat (termasuk penggunaan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang seringkali mencerminkan sifat kebutuhan kelompok elit yang berkuasa daripada preferensi dan kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didorong melalui pembentukan forum-forum yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan proyek-

proyek pembangunan di lingkungan mereka atau di tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan kontribusi masyarakat dalam bentuk pekerjaan, uang, dan/atau bentuk lain yang sepadan dengan keuntungan yang akan diperoleh setiap anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemeliharaan inisiatif pengembangan masyarakat yang telah berhasil diselesaikan, di samping partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan khusus untuk memobilisasi anggota masyarakat agar hasil pembangunan tetap terjaga sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

Proyek Pembangunan Sangatlah penting untuk memantau dan mengevaluasi program dan proyek pembangunan. Tidak hanya diperlukan untuk menerima umpan balik atas masalah dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan, tetapi juga diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Dalam skenario ini, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengumpulkan informasi tentang pengembangan kegiatan dan pejabat pembangunan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Unsur terpenting yang sering dilupakan adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah

untuk meningkatkan kualitas hidup sejumlah besar orang, maka pemerataan hasil pembangunan menjadi tujuan utama. Ketersediaan dan kesukarelaan masyarakat untuk ikut serta dalam setiap inisiatif pembangunan yang datang akan dipicu oleh pemanfaatan hasil pembangunan.

Akan tetapi, pada umumnya pemerintah dan penyelenggara pembangunan pada umumnya kurang memperhatikan pemanfaatan hasil pembangunan, dengan asumsi bahwa begitu pembangunan dilaksanakan, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh kelompok sasaran. Kenyataannya, populasi sasaran seringkali tidak menghargai manfaat langsung dari setiap inisiatif pembangunan, sehingga pembangunan tidak efektif.

1.6.4.4 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pelaku pembangunan harus menyadari tingkat partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami indikasinya sambil menilai tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Ife dan Tesoriero, mengukur partisipasi masyarakat secara kualitatif mencakup “peningkatan kapasitas masyarakat untuk memobilisasi tindakan, meningkatkan dukungan masyarakat dan membangun jaringan yang lebih kuat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang topik-topik seperti uang dan manajemen proyek, keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan ide-ide mereka, partisipasi yang luas di luar proyek untuk mewakilinya dalam kelompok lain, munculnya pemimpin-

pemimpin dari masyarakat, peningkatan kolaborasi dengan proyek, komunitas, dan organisasi lain, serta mulai mempengaruhi kebijakan”.

Sedangkan Wilcox (Theresia, 2014:202) mengusulkan 5 (lima) tingkat partisipasi, yaitu “(1) memberikan informasi. (2) Konsultasi (konsultasi); yaitu, mengungkapkan komentar dan menjadi pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak berpartisipasi dalam implementasi ide dan konsep tersebut. (3) Pengambilan keputusan kolaboratif (decision making together); dalam arti memberikan dukungan pemikiran, konsep, dan keputusan, serta membangun peluang pengambilan keputusan. (4) Bekerja sama (working together); tidak hanya dalam hal pengambilan keputusan, tetapi juga dalam hal terlibat dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan. (5) Memberikan dukungan (supporting independent community interest); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan”.

1.6.4.5 Faktor keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (Theresia, 2014:207), bahwa “tiga komponen utama yang menentukan tumbuh dan berkembangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan: (1) kesempatan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, (2) kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, dan (3) kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi”.

Menurut Goldsmith (Ndraha, 2001: 105), “Orang tergerak untuk berpartisipasi jika (1) partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau ada di masyarakat, dan (2) keterlibatan memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat. (3) keuntungan yang dicapai melalui keterlibatan dapat

memuaskan kepentingan masyarakat lokal, dan (4) proses partisipasi memastikan kontrol masyarakat. Jika mereka tidak atau memiliki sedikit keterlibatan dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat berkurang”.

1.6.4.6 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Tantangan pertama dan terbesar dalam membangun pelibatan masyarakat dalam pembangunan, menurut Soetrisno dalam Theresia (2014: 211), adalah :

Pertama belum terbangunnya makna partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesungguhnya.

- a. Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk mendukung sepenuhnya pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah (aparatur), dengan masyarakat berperan sebagai pasif dan tunduk pada pemerintah.
- b. Di lapangan, pembangunan yang diciptakan dan ditentukan oleh pemerintah digambarkan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan pembangunan yang dibangun dan ditentukan oleh masyarakat diartikan sebagai keinginan masyarakat yang diprioritaskan lebih rendah.
- c. Partisipasi masyarakat, yang secara tipikal didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah-masyarakat yang mengabaikan keberadaan subsistem yang berada di bawah supra-sistem dan secara tepat mengakomodasi tujuan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Masalah kedua, dengan menetapkannya sebagai ideologi baru yang

harus dijaga ketat, mendorong mesin pemerintah menjadi diktator.

Masalah ketiga adalah beberapa peraturan yang meredam kemauan

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Efektivitas

Efektivitas yaitu tolak ukur untuk melihat seberapa jauh target seperti kualitas, kuantitas dan waktu. Jadi semakin tinggi persentase target yang dicapai tersebut, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.

Teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas program pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa di desa lapa ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat.

1.7.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

1.7.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyer (1984) menjelaskan bahwa pendekatan dalam

partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan.

1.8 Definisi Operasional

TABEL 1.1

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lape Kecamatan Lape ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat	Ketepatan Sasaran Program	-Sasaran yang dicapai dari program
		Sosialisasi Program	- Sosialisasi langsung - Sosialisasi tidak langsung
		Tujuan Program	-Kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan.
		Pemantauan Program	-Pengawasan dan monitoring terhadap program yang dilaksanakan oleh pihak pejabat atau pihak terkait.
2.	Mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa	Internal	-Pendidikan -Status kependudukan -Pekerjaan
		Eksternal	-Tingkat intensitas interaksi -Tingkat transparansi -Kepemimpinan pemerintah desa

	Lape Kecamatan Lape Ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat		
--	--	--	--

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada mendeskripsikan dan mengevaluasi kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, sikap gembira, gagasan, persepsi, orang secara individu atau kelompok, dan penting untuk mengungkap prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan (Suryana, 2015).

Peneliti menggunakan data dari penelitian ini untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Lape, Kecamatan Lape, dengan mengidentifikasi dan menganalisis seberapa efektif pengelolaan uang desa dari sudut pandang partisipasi masyarakat.

1.9.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu terletak di Desa Lape Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa NTB. Alasan mengambil penelitian di lokasi ini karena belum terdapat peneliti sebelumnya yang meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa ditinjau dari sudut partisipasi masyarakat serta terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan dana desa di desa tersebut.

1.9.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

1.9.3.1 Data Primer

Peneliti menggunakan data primer yang didapatkan dari kegiatan observasi di lokasi penelitian serta melakukan wawancara terkait dengan penelitian yang dilaksanakan.

1. Wawancara

Wawancara, menurut Koentjaraningrat, merupakan cara untuk memperoleh informasi dan membentuk responden secara verbal agar dapat berkomunikasi secara langsung. Wawancara, menurut Lexy J. Moleong, adalah pembicaraan dengan tujuan yang pasti. Ketika dua orang atau lebih terlibat dalam percakapan, seperti pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).

TABEL 1.2 Data Wawancara

Informan	Jabatan
Joni Ardiansyah, A.Md	Kepala Desa
Syafruddin	Sekretaris Desa
Hatifah	Kaur Keuangan
Daryono	Sekretaris BPD
Jamaluddin Gunawan	Kepala Dusun Karato
Muslimin Salam	Kepala Dusun Lape bawah
Sri Herawati	Ibu PKK

Usman kadir	Masyarakat
-------------	------------

1.9.3.2 Data Sekunder

Data sekunder didefinisikan sebagai berikut oleh Sugiyono (2012:141): “Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku, dan dokumen”. “Data diperoleh dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia sebelum investigasi dilakukan,” tulis Ulber Silalahi (2012: 289).

Penulis penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian mereka. Dimana sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari Desa Lape melalui wawancara, dan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah mengenai efektivitas pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2021. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau laporan melalui sumber lain yang sudah tersedia. sebelum penulis melakukan penelitian, seperti buku-buku tentang laporan efektivitas pengelolaan dana desa, sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian.

A. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:476), adalah sarana pengumpulan data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka

tertulis, dan foto berupa laporan dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembelajaran. Studi dokumen berguna dalam hubungannya dengan teknik observasi dan wawancara. Jika didukung oleh gambar atau publikasi penelitian terkini, mereka akan lebih dapat dipercaya atau kredibel. Namun, tidak semua dokumen memilih tingkat kepercayaan yang tinggi. Karena gambar mungkin dibuat untuk tujuan tertentu, banyak foto tidak mencerminkan kondisi aslinya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang dimiliki Supervisor HRGA seperti RPJMDes dan APBdes serta lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

1.9.4 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482), “analisis data adalah proses secara sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, merinci menjadi unit-unit, mensintesis, dan menyusun menjadi pola, menentukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”. Sedangkan analisis data menurut Moleong (2017: 280-281) adalah “tindakan mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam pola, klasifikasi, dan satuan deskripsi yang mendasar untuk menemukan tema dan membangun hipotesis kerja berdasarkan data tersebut”.

Data penelitian kualitatif berasal dari berbagai sumber dan dikumpulkan

dengan menggunakan berbagai strategi pengumpulan data (triangulasi) sepanjang waktu, sehingga menghasilkan varians data yang sangat tinggi. Model Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian untuk analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu tertentu, menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246). Kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan sampai tuntas, pada titik mana mereka selesai. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

1. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono (2018: 247-249), “reduksi data meliputi meringkas, memilih hal hal yang paling signifikan, memfokuskan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, dan akhirnya membuat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian. . pengumpulan data lebih lanjut Reduksi data akan dipimpin oleh tujuan yang ingin dicapai, yang telah ditetapkan sebelumnya. Reduksi data adalah proses berpikir kritis yang membutuhkan tingkat kecerdasan dan pemahaman yang tinggi”.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap selanjutnya adalah penyajian data setelah direduksi. Tabel, grafik, diagram alur, piktogram, dan alat bantu visual lainnya dapat digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif. Data dapat dikategorikan dan ditempatkan dalam pola hubungan agar lebih mudah

dipahami melalui tampilan data. Selanjutnya, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk deskripsi singkat, bagan, korelasi antar kategori, bagan alur, dan sejenisnya, meskipun proses naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Data diurutkan dan diatur dengan tampilan materi, sehingga lebih mudah untuk dipahami. (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis studi kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2018: 252-253) dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah hasil baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan dapat berbentuk deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya bersifat ambigu tetapi menjadi jelas setelah diselidiki.

